

REKRUTMEN POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024



AFFAN NAUFAL
E041191056



DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN JUDUL

**REKRUTMEN POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
GOWA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024**

AFFAN NAUFAL

E041191056



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGAJUAN

REKRUTMEN POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024

Yang Diajukan Oleh :

AFFAN NAUFAL

E041191056

Skripsi,

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada

Program Studi Ilmu Politik

Pada

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**REKRUTMEN POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
GOWA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024**

AFFAN NAUFAL
E041191056

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana pada tanggal 11 September 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

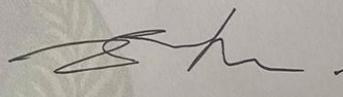
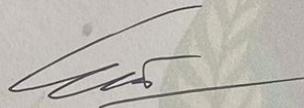
Universitas Hasanuddin

Makassar

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

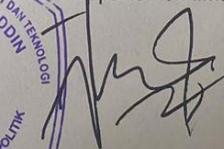


Prof. Dr. Muhammad, M.Si
NIP. 19710917 199703 1 001

Andi Naharuddin, S.IP., M.Si
Nip. 19731122 200212 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si
Nip. 19791218 200812 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "REKRUTMEN POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Muhammad, M.S.I sebagai Pembimbing Utama dan Andi Noharuddin, S.IP.,M.Si sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 11 September 2024



AFFAN NAUFAL
NIM E041191056

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sang Ilahi atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Rekrutmen Politik Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Legislatif 2024”. Tak lupa juga, penulis haturkan shalawat serta salam kepada baginda sang kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran orang-orang istimewa bagi penulis, maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, Alm.Ayahanda Kasman Museng dan Ibunda Nurdahlia Huri, terima kasih atas doa, dukungan, pengorbanan serta cinta dan kasih sayang yang selalu mengiringi tiap langkah penulis sehingga bisa sampai ke titik ini, serta kepada saudara kandung penulis yaitu Adnan dan Fiqran yang selalu membantu dan memberikan semangat serta menjadi sumber motivasi kuat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Muhammad, M.Si selaku dosen pembimbing utama dan Andi Naharuddin, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada tim penguji ujian skripsi penulis yakni Prof. Dr. Armin Arsyad., M.Si dan Dr. Gustiana A.Kambo, S.IP., M.Si.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat dan sukacita, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Prof. Dr. Phil sukri, S.IP., M.Si.**, sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Ibu **Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak **Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.** beserta segenap jajaran staf.

6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.**, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.**, Alm. Bapak **Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag.**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, M.A.**, Ibu **Dr. Ariana, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Gustiana A Kambo, M.Si.**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.**, Ibu **Endang Sari, S.IP., M.Si.**, Bapak **Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.**, Ibu **Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.**, Bapak **Prof. Dr. Muhammad M.Si.**, Bapak **Haryanto, S.IP., M.A.**, Bapak **Zulhajar, S.IP., M.A.**, dan Ibu **Dian Ekawaty, S.IP., M.A.**, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak **Syamsuddin, S.T.**, dan Ibu **Musriati S.E.**, yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi departemen Ilmu Politik.
9. Keluarga besar **Himapol Fisip Unhas**, terima kasih atas dukungan, dorongan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi tempat belajar dan menemukan pengalaman dalam berorganisasi
10. Kepada teman-teman **Diplomasi 2019**, yang telah kebersamai penulis selama menjadi mahasiswa dan memberikan warna di Himpunan mahasiswa politik sejak awal pertemuan hingga akhir kelulusan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
11. Teman-teman angkatan penulis **Ilmu Politik 2019** atas kebersamaan dan segala dinamika didalamnya.
12. Seluruh teman-teman **KKNT Infrastruktur PUPR Gowa Gelombang 108, Posko 19 Desa Palangga** yang telah kebersamai penulis selama masa KKN.
13. Kepada seluruh **informan** yang telah memberikan data dan informasi akurat sesuai dengan yang peneliti butuhkan.
- 14.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas tulisan ini.

Makassar, 11 September 2024

Affan Naufal

ABSTRAK

AFFAN NAUFAL. **REKRUTMEN POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN GOWA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024** (dibimbing oleh Muhammad dan Naharuddin)

Latar Belakang. Di Indonesia sendiri dengan keberagaman masyarakatnya yang tinggi membuat pengaruh besar terhadap dinamika politik yang ada. Maka dari itu, partai politik sebagai perwujudan perwakilan masyarakat, mempunyai tuntutan untuk berusaha mengakomodir setiap kepentingan masyarakat untuk memperkuat potensi kemenangan dalam pertarungan politik. Hal ini mendorong partai dalam menentukan strategi yang efisien khususnya dalam proses rekrutmen kader partai sehingga dapat menyaring aktor-aktor politik yang memiliki potensi sosial dan politik yang tepat sehingga menjadi faktor penentu kemenangan partai dalam pemilu. Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa dalam pemilihan umum tahun 2024 menjadi sesuatu yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh sebab dalam pemilihan yang baru saja selesai, Partai PPP berhasil mendapatkan perolehan suara dan kursi yang meningkat secara drastis jika dibandingkan pada pemilihan umum sebelumnya pada tahun 2019. **Tujuan.** Penelitian ini mengkaji tentang proses rekrutmen politik partai persatuan pembangunan Kabupaten Gowa pada pemilihan legislatif tahun 2024. **Metode.** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana proses rekrutmen politik Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa dalam pemilihan legislatif tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan Institusional untuk melihat partai politik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara terhadap beberapa informan yang terkait dengan penelitian, serta melakukan observasi terjun langsung ke lokasi penelitian dan menggunakan studi kepustakaan sebagai data sekunder. **Hasil.** Penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen politik yang diterapkan oleh PPP Gowa pada pemilihan legislatif tahun 2024 melalui prosedur tertutup memiliki efektivitas untuk keluar sebagai partai pemenang dalam kontestasi politik. Strategi rekrutmen dengan metode bedah dapil dapat mendongkrak suara dan menarik simpati masyarakat. **Kesimpulan.** Proses rekrutmen tertutup yang diterapkan oleh PPP untuk mengusung calon legislatif membuat PPP kembali menjadi jawara sehingga mengamankan kursi ketua DPRD Gowa selanjutnya.

Kata kunci : Partai Politik, Rekrutmen Politik, Pemilihan Umum

ABSTRACT

AFFAN NAUFAL. POLITICAL RECRUITMENT PATTERNS OF THE DEVELOPMENT UNION PARTY OF GOWA DISTRICT IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS

(supervised by Muhammad and Naharuddin).

Background. In Indonesia itself, the high diversity of its society has a major influence on the existing political dynamics. Therefore, political parties as the embodiment of community representatives, have demands to try to accommodate every community interest to strengthen the potential for victory in political battles. This encourages parties to determine efficient strategies, especially in the process of recruiting party cadres so that they can filter political actors who have the right social and political potential so that they become a determining factor for party victory in elections. The United Development Party of Gowa Regency in the 2024 general election is something that is interesting to explore further because in the recently completed election, the PPP Party managed to get a drastic increase in votes and seats when compared to the previous general election in 2019. **Objective.** This research examines the political recruitment pattern of the Gowa Regency Development Union Party in the 2024 legislative elections. **Objective.** This research examines the political recruitment pattern of the Gowa Regency Development Union Party in the 2024 legislative elections. **Method.** This research uses a descriptive qualitative method to describe how the political recruitment pattern of the United Development Party of Gowa Regency in the 2024 legislative election by using the Institutional approach to see political parties. The data collection techniques used were interviews with several informants related to the research, as well as direct observation to the research location and using literature studies as secondary data. **Results.** The research shows that the political recruitment pattern applied by PPP Gowa in the 2024 legislative elections through closed procedures has the effectiveness to emerge as the winning party in political contestation. The recruitment strategy with the electoral district surgery method can boost votes and attract public sympathy. **Conclusion.** The closed recruitment pattern applied by PPP to carry legislative candidates made PPP again a champion so as to secure the seat of the next chairman of DPRD Gowa.

Keywords: Political Parties, Political Recruitment, General Elections

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA Error! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Secara Teoritis	6
1.4.2. Secara Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Pendekatan Institusional	10
2.3 Partai Politik	11
2.4 Fungsi Partai Politik	12
2.5 Rekrutmen Politik	14
2.6 Skema Kerangka Berfikir	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Tipe dan Dasar penelitian	19
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian	20
3.3 Jenis Data	20

3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.5	Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		22
4.1	Lokasi Penelitian	22
4.1.1.	Sejarah Singkat Partai Persatuan Pembangunan	23
4.1.2.	Gambaran Umum Politik Pemerintahan Kabupaten Gowa	25
4.2	Pelaksanaan Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2024	27
4.3	Faktor Pendukung Yang Mempengaruhi Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2024	32
4.3.1.	Elektabilitas Partai Politik PPP Gowa	32
4.3.2.	Figur/Elit Politik PPP Gowa.....	33
4.3.3.	Peran Ketua DPC PPP Gowa	35
4.3.4.	Orientasi Organisasi Sayap Partai Politik PPP Gowa.....	36
4.4	Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gowa	38
4.4.1.	Keterwakilan Perempuan	38
BAB V PENUTUP.....		40
5.1	Kesimpulan	40
5.2	Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA		42
LAMPIRAN		44

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam dua periode terakhir .	4
Tabel 2 Peta Pemilihan DPRD Kabupaten Gowa	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Gowa	23
Gambar 2 Logo Partai Persatuan Pembangunan	24

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1. Berkunjung Ke Kantor PPP Gowa	44
Dokumentasi 2. Wawancara dengan Ketua DPC PPP Gowa	45
Dokumentasi 3. Wawancara dengan Sekretaris PPP Gowa	46
Dokumentasi 4. Wawancara dengan Wakabid Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi PPP Gowa	47
Dokumentasi 5. Wawancara dengan Kader PPP Gowa	48
Dokumentasi 6. Wawancara dengan Masyarakat Gowa	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi telah menjadi arus utama dalam sebuah negara. Prasyarat suatu negara demokrasi adalah penyelenggaraan Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat Pemilu. Hal ini telah diakui oleh organisasi *Inter-Parliamentary Union* melalui *Universal Declaration on Democracy* yang diadopsi pada 16 September 1997 di Kairo.¹ Deklarasi tersebut menegaskan bahwa elemen kunci untuk menjalankan sebuah negara demokrasi adalah dengan cara menyelenggarakan pemilihan yang jujur dan adil secara berkala modern. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung ke dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum mempunyai konsekuensi yakni adanya supremasi hukum yang berarti setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku selain harus memberikan kepastian hukum. Sistem demokrasi yang berlandaskan hukum dan berkedaulatan rakyat menjadi dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia menyatakan bahwa suatu pemerintahan dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk pengejawantahan dari sistem demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu secara langsung. Adapun landasan dasar dilaksanakannya pemilu adalah pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang telah mengamanatkan diselenggarakannya pemilu dengan berkualitas, mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui suatu perundang-undangan.²

Rakyat yang berhak berpartisipasi pada pemilu adalah rakyat yang berstatus dan berkecukupan umur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbicara mengenai partisipasi rakyat dalam negara demokrasi mempunyai makna bahwa dalam proses pemberian suara dalam pemilu, rakyat menjalankan hak dan kewajiban mereka tersebut untuk memilih dan menentukan figur dan arah kepemimpinan suatu negara. Selain itu sebagai negara demokrasi, Indonesia harus menghargai dan menghormati adanya hak asasi manusia (HAM) yang berarti negara Indonesia harus menghargai dan menghormati hak-hak warga negara antara lain ialah hak untuk berkumpul, mendirikan perkumpulan atau perserikatan, menyatakan pendapat dan pemikirannya. Perkumpulan atau perserikatan tersebut dapat dilihat dari adanya organisasi kemasyarakatan, serikat kerja,

¹ *Universal Declaration on Democracy*, dalam Janedri M Gafar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm.4

² Latipah Nasution, "Pemilu Dan Kedaulatan Rakyat," *'ADALAH* 1, no. 9 (2017)

LSM, dan Partai Politik.

Partai politik adalah representasi dari wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokratis. Partai politik hadir ditengah masyarakat untuk mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Dalam mewujudkan hal tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan arena kompetisi dalam meregenerasi kepemimpinan. Menang atau kalahnya suatu kandidat dalam pemilu akan ditentukan oleh rakyat yang diatur dalam mekanisme pemungutan suara. Sebagai instrumen penting dalam rangka melakukan seleksi untuk menentukan para wakil sekaligus pemimpin rakyat yang bersender dalam lingkup pemerintahan, maka Pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam memilih aktor yang dianggap mampu untuk mengaspirasikan suara rakyat. Untuk menjaga eksistensi dalam sistem politik, Partai politik diharuskan bersaing dalam pemilihan umum guna memperoleh suara dari masyarakat dan mendapat kursi di parlemen.

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik memberikan kontribusi yang signifikan bagi kinerja sistem politik khususnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis. Kedudukan partai politik memiliki fungsi yang menjadi tanggung jawab untuk dijalankan. Secara umum, fungsi partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, pengatur konflik, artikulasi serta agregasi kepentingan, pembuat kebijakan, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik.³

Sebagai roda penggerak dalam sistem politik, Partai politik memiliki wadah dari partisipasi rakyat dalam berpolitik yaitu melalui proses rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan alat vital bagi kelestarian partai politik itu sendiri. Dalam artian perekrutan terhadap anggota dan kader partai yang loyal dan berkualitas untuk mencetak wakil dan pemimpin rakyat. Proses dalam partai politik ini harus berjalan secara terstruktur dan sistematis. Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu Negara karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup.

Berkaitan dengan rekrutmen politik diatur sebagaimana bunyi UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pada pasal 11 yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Semakin besar andil partai politik untuk memenangkan perjuangan dalam pengisian jabatan politik, merupakan indikator bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

³Suprihatini, Amin. 2008. *Partai Politik di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.

Sumber daya yang paling utama dalam berpolitik adalah sumber daya manusia dikarenakan partai politik tidaklah digerakkan oleh mesin dan teknologi tetapi oleh manusia. Dengan demikian, strategi organisasi partai politik dalam mendapatkan manusia yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi merupakan tantangan utama dalam hal manajemen organisasi partai politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen dimana tentunya orang yang memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga akan terjadi untuk memperebutkan orang-orang berpotensi yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.⁴

Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota disebut pemilihan umum legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum legislatif merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat yang dapat mewakili aspirasinya dengan tata cara pelaksanaannya diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada demokrasi perwakilan, rakyat memegang kedaulatan penuh namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh wakil rakyat yang telah dipilih melalui lembaga legislatif atau parlemen. Diadakannya pemilihan umum legislatif membuat partai politik sebagai wadah yang menyediakan calon legislatif untuk melakukan perekrutan bakal calon anggota secara demokratis.

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa berbatasan dengan pintu gerbang dari bagian selatan kota Makassar yang menjadi ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa sendiri memiliki jumlah penduduk tertinggi ketiga (setelah Makassar dan Bone). Seluruh wilayah di provinsi Sulawesi Selatan menggelar pemilihan umum legislatif termasuk kabupaten Gowa. Berbicara mengenai sejarah pemilihan legislatif di Bumi Bersejarah Gowa, Partai Golkar selalu mendominasi dalam kontestasi tersebut.

Sebelumnya dalam dua kali Pileg di Gowa pada tahun 2009 dan 2014, Partai Golkar selalu keluar sebagai pemenang. Pada pemilu 2009, Partai Golkar mendominasi pemilihan legislatif di Kabupaten Gowa dimana Partai Golkar meraih sembilan kursi dan mendudukkan kadernya sebagai Ketua DPRD yaitu Tenri Olle Yasin Limpo. Lima tahun sesudahnya pada Pemilu 2014, Golkar meraih sembilan kursi dan mengalahkan saingan terdekatnya yaitu Gerindra 8 kursi, PPP 6 kursi dan PAN 5 kursi serta mendudukkan kadernya yakni Muh Ansar Zainal Bate sebagai Ketua DPRD Gowa. Sementara dalam Pemilihan Legislatif Provinsi Sulsel, Partai Golkar menyumbang 3 kursi di Dapil 3 meliputi Kabupaten Gowa-Takalar dimana dua diantaranya adalah politisi Golkar asal Gowa yaitu Tenri Olle Yasin Limpo dan Rahmansyah.

Sedangkan pada pemilu 2019, Untuk pertama kalinya dalam sejarah Golkar tidak lagi keluar sebagai pemenang di Kabupaten Gowa dimana Golkar hanya dapat mengontrol 3 kursi dari total 45 kursi. Padahal periode sebelumnya Golkar meraih 9 kursi di DPRD Gowa dari total 7 daerah pemilihan. Bahkan Golkar gagal membentuk satu

⁴Firmansyah. 2008. *Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Politik Di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm.248

fraksi utuh di DPRD Gowa periode 2019-2024. Partai berlambang pohon beringin ini meredup sejak ditinggal trah Yasin Limpo. Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan memutuskan mengundurkan diri sebagai Pelaksana tugas Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gowa pada tahun 2017 lalu. Pengunduran diri itu juga diikuti sejumlah loyalis mantan Bupati Gowa sekaligus Ayah Adnan, Alm. Ichsan Yasin Limpo. Selain itu, tujuh anggota DPRD Gowa termasuk mantan Ketua DPRD Gowa yakni Muh Ansar Zainal Bate dari Fraksi Golkar juga mengundurkan diri dan memutuskan berlabuh ke partai lain. Hasilnya di Pemilihan Legislatif 2019, Partai Golkar tak lagi mendominasi.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014–2019	2019–2024
PKB	1	▲4
Gerindra	8	▼7
PDI-P	4	▼2
Golkar	9	▼3
NasDem	(baru) 3	▲5
PKS	3	—3
Perindo	-	(baru) 4
PPP	6	▲8
PAN	5	▼3
Hanura	1	▼0
Demokrat	5	▲6
Jumlah Anggota	45	—45
Jumlah Partai	10	—10

Tabel 1 Komposisi anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam dua periode terakhir

Dari hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan umum legislatif menyatakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gowa berhasil meraih perolehan suara sebesar 60.605. KPU Gowa juga menyatakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan berhasil menduduki kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa. Partai berlambang Kabbah ini meraih delapan kursi atau yang terbanyak serta memastikan kursi ketua DPRD Gowa periode 2019-2024 diraih oleh fraksi PPP. Sementara partai lain dibawah bayang PPP yaitu partai Gerindra dengan tujuh kursi, partai Demokrat sebanyak enam kursi, partai Nasdem sebanyak lima kursi, PKB sebanyak empat kursi, Perindo sebanyak empat kursi, PKS sebanyak tiga kursi, Golkar sebanyak tiga kursi, PAN sebanyak tiga kursi, serta PDI-Perjuangan sebanyak dua kursi. Adapun partai yang gagal menduduki kursi DPRD Gowa diantaranya Garuda, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, dan PKP.

Kemenangan besar PPP membuat redup partai Golkar. Partai ini menggosok dominasi Golkar yang puluhan tahun menguasai lembaga legislatif di Bumi Bersejarah Gowa. Perolehan kursi PPP Gowa meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada Periode 2014-2019 kemarin PPP Gowa hanya mendapat 6 kursi dan Periode 2019-2024 bertambah menjadi 8 kursi. Berkaca pada Pileg tahun 2019 lalu membuat ambisi PPP makin kuat dalam menyodorkan calegnya. Komitmen Partai Persatuan Pembangunan Gowa menjadi pemenang di Pileg 2024 tak akan luntur.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Gowa, Nursyam Amin mengatakan bahwa dalam menghadapi pemilihan legislatif 2024 mendatang, PPP optimis mampu mempertahankan kemenangan dengan melipat gandakan perolehan kursi dengan minimal 9 kursi atau lebih banyak dari 8 kursi yang dimiliki saat ini dengan target untuk meraih 11 kursi. Untuk menopang target tersebut, DPC PPP Gowa telah membentuk tim pemenangan untuk PPP. Target tersebut didukung dengan adanya caleg millenial sekitar 60% yang berpotensi mengisi kursi di DPRD Gowa nantinya. Adapun komposisi Daftar Calon Sementara (DCS) berjumlah 45 orang. Jumlah itu terdiri dari 29 laki-laki dan 16 perempuan yang tersebar pada tujuh daerah pemilihan. Ketua DPC Gowa juga menambahkan bahwa PPP Gowa sedang merampungkan daftar bakal calon legislatif (bacaleg) yang akan dibagi perdapil.

Sebagai pemenang dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 lalu membuat api semangat bagi PPP untuk mengulangi kesuksesannya di tahun 2024 mendatang. Tujuan dari PPP tak sekedar untuk menjadi pemenang pada konstentasi. Pihaknya ingin meningkatkan target untuk meraih 11 kursi agar dapat mengusung sendiri calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gowa 2024 mendatang tanpa harus koalisi. PPP akan mempertahankan kursi ketua DPRD Gowa tersebut untuk meraih dua kali kemenangan. Melihat target tersebut dan kesuksesan di Pemilihan Legislatif sebelumnya menjadi bukti bahwa rekrutmen kader politik yang dihasilkan oleh PPP berkompeten dan berkualitas. Hal ini membuat dorongan besar bagi internal PPP dalam menjaring dan meningkatkan rekrutmen kadernya untuk memenuhi hasrat partai tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana peran Partai Persatuan Pembangunan dalam menerapkan salah satu fungsinya yaitu rekrutmen politik untuk menghadapi

pemilihan legislatif tahun 2024. Untuk itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul ***“Rekrutmen Politik Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilu Legislatif 2024”***.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah disampaikan diatas dan berdasarkan latar belakang masalah dan luasnya cakupan judul, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah ***“Bagaimana Rekrutmen Politik yang diterapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan dalam menetapkan Calon Legislatif di Kabupaten Gowa Tahun 2024?”***.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah ***Untuk mengetahui Rekrutmen Politik yang diterapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan dalam menetapkan Calon Legislatif I Kabupaten Gowa Tahun 2024.***

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan pada penelitian ini, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara Akademis dan Praktis

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkhususnya dalam studi Ilmu Politik untuk memperkaya kajian mengenai Partai Politik serta dapat menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang untuk melakukan penelitian serupa.

1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu bagi penulis secara pribadi dan juga memberikan informasi pemahaman kepada khalayak publik dalam ranah Ilmu Politik mengenai kajian Partai Politik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bagian penting untuk memperjelas sebuah penelitian dari tinjauan teoritisnya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini sebagai bahan referensi dan menjadi pembanding dengan penelitian ini. Pada bab ini juga akan menjelaskan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian serta menjelaskan kerangka pikir dan skema kerangka pikir yang akan diuraikan sebagai berikut.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti dalam mencari sumber referensi untuk dijadikan sebuah perbandingan dengan penelitian sebelumnya untuk melakukan penelitian selanjutnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menghindari kesaamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus menunjukkan keaslian dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu memberikan manfaat untuk menunjukkan urgensi dari sebuah penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shintya Monica Hasibuan, Via Avinka Valentina, Riska Adelina Nasution, Zulhasmi Maulana, Elly Warnisyah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul penelitian "*Penarapan Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada PKS DPRD Sumatera Utara*". Adapun hasil dari penelitian ini adalah pola rekrutmen politik yang digunakan oleh DPW PKS Sumut dalam merekrut calon anggota baru yaitu dengan pola rekrutmen yang bersifat terbuka. DPW PKS Sumut menggunakan pola rekrutmen yang bersifat terbuka yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang ideology, visi dan misi partai. Seperti contoh adanya kegiatan pembuatan video kreatif, lomba baca kitab kuning, dll sebagainya. Kegiatan video kreatif ini merupakan salah satu bentuk menggali potensi dari setiap kalangan terutama anak-anak muda serta dalam menjalankan fungsi partai yaitu sebagai rekrutmen politik disamping ajang video kreatif akan diselipkan formulir keanggotaan. Selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, seluruh anggota yang berada di struktural maupun non struktural juga diwajibkan untuk memasarkan partai PKS ini secara door to door yang dimana dengan cara tersebut lebih memudahkan para anggota untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat sampai ketinggian terendah yaitu tingkat RT. Anggota yang tergabung dengan partai PKS diwajibkan untuk ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh RT setempat sesuai dengan tempat tinggal masing-masing agar bisa lebih mengenalkan partai PKS ini secara baik dan jelas.⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tarsan Asmara, Misran Safar, Samiruddin T dari Universitas Halu Oleo dengan judul penelitian "*Pola Rekrutmen Politik (Studi pada DPD II Partai Golkar dalam Menetapkan Calon Legislatif pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Muna)*". Adapun hasil dari penelitian ini adalah DPD II partai Golkar dalam melakukan perekrutan hanya dengan memberikan pengumuman kepada semua kader tentang pendaftaran calon anggota legislatif. Calon yang telah mendaftarkan diri dan dianggap layak kemudian diberikan formulir kesediaan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif tanpa adanya tahap ujian. Kader yang telah menjadi calon anggota legislatif tidak melalui proses dalam bentuk ujian maupun pelatihan. Calon anggota legislatif hanya melalui proses pengisian formulir kesediaan mencalonkan diri serta mendapatkan pembekalan yang diikuti oleh seluruh anggota calon legislatif. DPD II partai Golkar pada perekrutan calon legislatif dilakukan melalui koopsi dimana pemimpin-pemimpin atau koordinator yang ada dalam hal ini calon legislatif yang telah direkrut oleh Ketua DPD II partai Golkar dapat membantu pelaksanaan rekrutmen tipe-tipe pemimpin tertentu yaitu merekrut kembali calon legislatif di daerah pemilihan masing-masing. Adapun tipe-tipe pemimpin yang kembali direkrut oleh masing-masing koordinator tersebut yaitu calon legislatif yang mempunyai basis massa yang jelas serta peluang keterpilihan calon pada daerah pemilihan masing-masing.⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Amril Pratama Putra, Hasan Rahman, Muhammadiyah dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul penelitian "*Pola Rekrutmen Politik Pada Partai Nasdem Kota Makassar Menuju Pemilihan Legislatif Tahun 2024*". Adapun hasil dari penelitian ini adalah Rekrutmen anggota Partai NasDem dilakukan dengan cara persuasif yang diawali dengan sosialisasi partai kepada masyarakat Kota Makassar untuk menampilkan eksistensi partai dalam menghadapi pemilu 2024. Rekrutmen anggota partai yang dilakukan dengan cara persuasif yang diawali dengan sosialisasi dalam bentuk promosi, kegiatan sosial dan kegiatan individu yang bertujuan untuk menampilkan eksistensi partai kepada masyarakat agar tertarik untuk bergabung menjadi anggota partai (Syahid, 2021). Bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota caranya cukup mudah, hanya mengisi formulir keanggotaan serta menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kemudian akan dibuatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai NasDem Kota Makassar. Sedangkan, implementasi rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan melalui tahap

⁵ Shintya Monica Hasibuan et al., "*Penarapan Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada PKS DPRD Sumatera Utara,*" *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, no. 2 (2023).

⁶ Tarsan Asmara, Misran Safar, and Samiruddin T, "*POLA REKRUTMEN POLITIK (Studi Pada DPD II Partai Golkar Dalam Menetapkan Calon Legislatif Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Muna),*" *SELAMI IPS* 12, no. 2 (2020).

penjaringan, tahap penyaringan, dan tahap penetapan berdasarkan syarat-syarat yang telah diberlakukan. Selain itu, sistem tertutup digunakan dalam penentuan orang-orang yang akan menempati jabatan-jabatan baik di internal partai maupun jabatan-jabatan pemerintah. Calon yang dapat mendaftar hanya dari kalangan tertentu sesuai dengan seleksi pihak NasDem. Contohnya apabila akan ditentukan calon pimpinan DPC, calonnya hanya dari pengurus yang terlebih dahulu telah mengikuti seleksi dari DPC itu sendiri. Pemilihan dilakukan pada saat rapat kerja DPC, yang pemilihnya adalah seluruh anggota DPC.⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muslimah dengan judul penelitian *"Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kota Banjarmasin Tahun 2020"*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh DPD Partai Golkar kota Banjarmasin yaitu rekrutmen terhadap anggota baru, rekrutmen pengurus partai, rekrutmen calon anggota legislatif dan rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pelaksanaan rekrutmen politik menjadi tanggung jawab partai politik untuk kelestarian partai dan mencetak pemimpin yang berkualitas. Implementasi rekrutmen anggota baru DPD Partai Golkar dilakukan dengan cara ajakan persuasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh seluruh anggota di tingkatan struktural partai. Ajakan untuk bergabung dengan DPD-PG dilakukan dengan mensosialisasikan ideologi, visi dan misi partai kepada masyarakat. Selain kader yang turun langsung ke masyarakat, DPD Partai Golkar juga mensosialisasikannya melalui media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik serta membuka web DPD Partai Golkar. DPD Partai Golkar lebih mengutamakan kesadaran dan kesukarelaan dari masyarakat untuk menjadi anggota DPD Partai Golkar. DPD Partai Golkar kota Banjarmasin membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi anggota partai. DPD Partai Golkar melakukan kaderisasi terhadap anggota dan seleksi kepemimpinan untuk memperoleh kader-kader Partai Golkar yang berkualitas sehingga apabila kader-kader partai tersebut menduduki jabatan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah dapat bekerja dengan baik..⁸

Dari penelitian diatas tersebut memiliki relevansi terkait dengan penelitian ini yang secara umum menjelaskan terkait bagaimana implementasi fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya yakni dari segi metode, sasaran atau penekanan dari penulis yang melakukan penelitian dengan konsep secara spesifik mengkaji proses rekrutmen politik Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Gowa.

⁷Muh Amril Pratama Putra, Hasan Rahman, and Muhammadiyah, *"Pola Rekrutmen Politik Partai Nasdem Kota Makassar Menuju Pemilihan Legislatif Tahun 2024,"* *Kybernology : Journal of Government Studies* 2, no. 1 (2022): 9–20.

⁸Siti Muslimah, *"IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK PADA PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020* Siti,"

2.2 Pendekatan Institusional

Dalam Ilmu politik, Pendekatan legal atau Institusional yang juga dikenal sebagai pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad ke-19 sebelum Perang Dunia II. Pendekatan ini menempatkan negara sebagai fokus utama. Dikatakan sebagai pendekatan legal adalah karena dalam pendekatan ini politik selalu dikaitkan dengan persoalan hukum sehingga pembahasannya banyak mengacu pada konstitusi dan hukum-hukum yang ada dalam sebuah negara. Pendekatan ini disebut formal karena pembahasannya seputar lembaga-lembaga dan struktur politik yang formal. Pembahasan yang akan muncul dengan demikian adalah mengenai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai-partai politik, sampai dengan sistem pemilu. Selain itu, pendekatan ini cenderung tidak melihat kekuatan-kekuatan politik yang berada di luar lembaga formal tersebut. Baik kelompok-kelompok informal, kepentingan, maupun media tidak menjadi bahan pengkajian dari pendekatan ini.

Analisa Apter cukup bisa menjelaskan hal ini. Ia memandang bahwa kelompok-kelompok tersebut berusaha untuk mempengaruhi kebijakan tanpa memiliki kekuatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemampuan kelompok-kelompok ini sangat terbatas. Berbeda dengan partai-partai politik yang memang secara konstitusional memiliki kemampuan dalam mempengaruhi secara langsung kebijakan dengan mengirimkan wakil mereka yang akan bersentuhan langsung dengan pembuatan kebijakan. Sehingga para teoritis kelembagaan melihat bahwa kekuatan kelompok ini sangat kecil dan tidak signifikan.

Apter menilai bahwa pendekatan kelembagaan mencoba mengatakan bahwa saluran aspirasi maupun kekuatan untuk mempengaruhi hanya bisa melalui representasi pemerintah yang ada dalam sebuah negara.⁹

Pelebagaan partai politik adalah proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya sehingga partai politik menjadi lebih dari sekedar organisasi. Pelebagaan partai politik mengandung dua faktor yaitu internal leksternal dan struktural-attitudinal. Dari kombinasi kedua faktor ini dihasilkan empat dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis proses pelebagaan sebuah partai politik Randall dan Lars merumuskan 4 dimensi yang dapat dijadikan pisau analisis proses pelebagaan partai politik yakni¹⁰ :

1. Dimensi kesisteman, dimensi ini merupakan persilangan dari aspek internal dan struktural. Dalam dimensi ini dijelaskan mengenai fungsi-fungsi partai politik (fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik dan kontrol politik).

⁹David E. Apter, *Introduction to Political Analysis* (Massachusetts: Winstrop Publisher, Inc, 1977) hlm. 163.

¹⁰Randall, Vicky dan Lars, Svasand. (2002). *Party Institutionalisation in New Democracies. Party Politics*, hlm. 34.

2. Dimensi identitas nilai, dimensi ini merupakan hasil dari persilangan aspek internal dengan kultural yang berkaitan dengan identitas partai politik yang berdasarkan ideologi partai. Indikator dari dimensi ini adalah hubungan partai politik berkaitan dengan kelompok tertentu dalam hal ini ketergantungan partai politik dengan kelompok sosial tertentu. Kemudian pengaruh klientisme dalam organisasi dimana dalam hubungan antara partai dengan anggota bersifat instrumental (didasarkan pada materi) atau bersifat ideologis (berdasarkan ideologi yang diterapkan oleh partai politik).

3. Dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan, dimensi ini merupakan hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural. Indikator terciptanya dimensi otonomi adalah dalam pembuatan keputusan oleh partai politik berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, dalam hal ini pengusaha, pemerintah, ormas, dll. Hubungan partai dengan pihak luar ini bersifat saling ketergantungan atau ada salah satu pihak yang mendominasi.

4. Dimensi citra publik terhadap suatu partai politik, dimensi ini merupakan persilangan aspek eksternal dengan kultur. Indikator dari dimensi pengetahuan publik tentang partai politik adalah pada keberadaan partai politik yang ada di tengah publik sudah melekat pada pengetahuan masyarakat ataukah masyarakat belum mengetahui partai politik tersebut.

2.3 Partai Politik

Partai Politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara yang memberikan wadah bagi warga negara untuk turut serta dalam proses pengelolaan negara. Partai Politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka dapat menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka dapat lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Partai Politik, menjelaskan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Definisi mengenai Partai Politik banyak dikemukakan oleh para ahli. Menurut Miriam Budiarjo, Secara umum partai politik merupakan sekelompok manusia terorganisir, yang anggota-anggotanya yang sedikit banyak mempunyai orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik untuk mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Partai Politik*, UU Nomor 2 tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

dilaksanakan.¹² Adapun Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil serta materiil.¹³ Sigmund Neumann dalam buku karyanya mendefinisikan partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.¹⁴

La Palombara dan Weiner mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik, adalah sebagai berikut :

1. Organisasi jangka panjang. Organisasi politik harus bersifat jangka panjang dimana diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.
2. Struktur Organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional dan ada pola interaksi yang teratur di antara keduanya sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.
3. Tujuan Berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan baik di level lokal maupun nasional. Ini pula yang membedakan partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat seperti perserikatan, asosiasi, dan ikatan.
4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya.¹⁵

2.4 Fungsi Partai Politik

Partai politik mempunyai peran sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai politik mempunyai peran sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Karena fungsi partai politik berpartisipasi dalam sektor pemerintahan dan turut serta

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008) Edisi Revisi Cet Ke-III, hlm. 406

¹³ Friedrich, *Constitutional Government and Democracy*, hlm.419.

¹⁴ Sigmund Neumann. "Modern Political Parties," dalam *Dasar-dasar Ilmu Politik* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 404

¹⁵ Firmanzah. 2008. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas Jakarta*: Yayasan Obor Indonesia, hlm 67-68.

mengambil dan menentukan keputusan politik. Peran dan fungsi partai politik dapat di bedakan menjadi dua.

Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga melakukan eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik¹⁶. Dalam menyelenggarakan negara yang demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik mempunyai fungsi salah satunya sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan rakyat.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Proses sosialisasi politik berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Proses ini dapat diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat

3. Sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

4. Sebagai sarana pengatur konflik

Potensi konflik akan selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen dengan berbagai macam suku bangsa, sosial-ekonomi maupun

¹⁶ Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 67.

agama. Peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi diantara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik.

2.5 Rekrutmen Politik

Penentuan pejabat publik menurut ilmu politik digunakan istilah rekrutmen politik. Menurut Ramlan Surbakti bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan dan juga untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik dipandang sebagai lembaga politik yang melaksanakan rekrutmen politik.¹⁷ Bagi partai politik, proses rekrutmen akan memberikan dampak yang baik untuk kemajuan suatu organisasi. Modal awal kemajuan organisasi terletak pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kualitas diartikan terdidik sesuai dengan tugas atau kewajiban, atau mempunyai pengalaman praktek atau fungsional. Serta dengan rekrutmen tersebut maka akan diseleksi kesesuaian antara karakter kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politik. Sehingga akhirnya ideologi partai politik lah yang menentukan seorang kandidat diterima atau tidak sebagai anggota partai politik.¹⁸ Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu Negara karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi - fungsi sistem politik itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Czudnowski sebagaimana dikutip oleh Fadillah Putra mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain :¹⁹

1. Rekrutmen terbuka, yaitu syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

¹⁷Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015 ,hlm.129

¹⁸Firmansyah, *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 70

¹⁹Putra, Fadillah. (2007). *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pusataka Belajar, hlm.103.

Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah mekanismenya demokratis, tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki, tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi, serta melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

2. Rekrutmen Tertutup, yaitu berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokratis berfungsi sebagai sarana elite memperbaharui legitimasinya.

Menurut Hasibuan, cara rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode yakni²⁰ :

1. Metode ilmiah, yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu.
2. Metode non ilmiah, yakni rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar - standar tertentu melainkan didasarkan pada perkiraan saja.

Pola rekrutman Partai politik juga dikemukakan oleh Romli, yakni sebagai berikut²¹:

1. *Partisan*, pendukung yang kuat serta loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis kader internal partai.
2. *Compartmentalization*, proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang.
3. *Immediate Survival*, proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhitungkan kemampuan orang yang direkrut.
4. *Civil Service Reform*, proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting.

Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup :

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat des/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang

²⁰Hasibuan, Melayu S.P. (2006). *Manajemen, Dasar, Pengertian Dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 52.

²¹Romli, Lily. (2005). *Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta: LIPI, h.78.

2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah

3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif

Rush dan Althof mengatakan bahwa sistem rekrutmen politik yang digunakan oleh suatu sistem politik terdapat beberapa model yaitu²² :

1. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan. Ujian dan latihan merupakan bentuk yang paling umum digunakan, biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan administrasi. Terkadang dilakukan juga oleh partai politik dalam bentuk pendidikan kader partai yang dilakukan melalui latihan.

2. Seleksi melalui penyortiran. Salah satu metode tertua yang digunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin politik adalah dengan penyortiran atau penarikan undian. Metode ini hanya digunakan di Yunani Kuno.

3. Seleksi melalui rotasi atau giliran. Suatu metode yang sama, yang dibuat untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu adalah dengan giliran atau rotasi. Metode ini dilakukan pada sistem yang menerapkan format kepemimpinan kolektif atau dalam bentuk presidium atau pada masyarakat yang memiliki pengelompokan politik yang sangat kental. Sehingga untuk menghindari konflik atau menjaga stabilitas politik baik itu partai politik atau pemerintahan negara, maka perlu dibuat sistem rotasi atau giliran.

4. Seleksi melalui perebutan kekuasaan. Merupakan salah satu metode perekrutan lama yang terdapat pada suatu sistem politik. Seleksi melalui perebutan kekuasaan ini biasanya dilaksanakan dengan jalan kekerasan atau menggunakan ancaman.

5. Seleksi dengan cara patronage. Merupakan bagian dari suatu sistem penyuaian dan sistem korupsi yang rumit.

6. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah. Berbeda dengan sistem patronage, seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah merupakan suatu faktor kontekstual yang vital dari sebagian besar sistem-sistem politik.

7. Seleksi melalui coopsi. Suatu metode yang lebih terbatas di mana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe

²² Rush, Michael; Philip Althoff. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 185-189

pemimpin tertentu. Coopsi meliputi pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.

2.6 Skema Kerangka Berfikir

Partai politik adalah representasi dari wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokratis. Partai politik hadir ditengah masyarakat untuk mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Sebagai roda penggerak dalam sistem politik, Partai politik memiliki wadah dari partisipasi masyarakat dalam berpolitik yaitu melalui proses rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan alat vital bagi kelestarian partai politik itu sendiri. Dalam artian perekrutan terhadap anggota dan kader partai yang loyal dan berkualitas untuk mencetak wakil dan pemimpin rakyat. Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu Negara karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara atau pemerintah. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah pemenang Pemilu 2019 di Gowa dengan delapan kursi di parlemen atau yang terbanyak serta mengamankan kursi ketua DPRD Gowa. Partai ini menggusur dominasi Golkar dalam menguasai lembaga legislatif di Gowa. Hal tersebut membuat PPP ingin meraih kemenangan selanjutnya di Pileg 2024 untuk mempertahankan kembali kursi ketua DPRD Gowa. Tujuan dari PPP tak sekadar untuk menjadi pemenang pada Pileg 2024 mendatang. Pihaknya ingin meningkatkan target untuk meraih 10 kursi agar dapat mengusung sendiri calon di Pilkada Gowa 2024 mendatang. Melihat target tersebut dan kesuksesan di Pemilihan Legislatif sebelumnya menjadi bukti bahwa rekrutmen kader politik yang dihasilkan oleh PPP berkompeten dan berkualitas. Hal ini membuat dorongan besar bagi internal PPP dalam menjaring kader-kader dalam proses rekrutmen sebagai modal untuk menghadapi pemilu legislatif tahun 2024.

